

**BUPATI KATINGAN**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)  
KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
  - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar Sembilan tahun yang bermutu, pemerintah mengalokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011.
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan mekanisme yang jelas terhadap penggunaan BOS yang dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180)
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 51 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah *Kabupaten/Kota*;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011;
21. *Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 36).*

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. **Pemerintahan Daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. **Bupati** adalah Bupati Katingan.
4. **Sekretaris Daerah** adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
5. **Perangkat Daerah** adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah, terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. **Dinas** adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
7. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
8. **Satuan Pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. **Pendidikan Formal** adalah jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. **Pendidikan Nonformal** adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang.
11. **Pendidikan Informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. **Pendidikan Anak Usia Dini** adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. **Biaya Operasi Satuan Pendidikan** adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
15. **Biaya Operasi Nonpersonalia** adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain.
16. **Pendanaan Pendidikan** adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
17. **Kepala Sekolah** adalah pejabat yang diangkat, dipercayakan dan dianggap mampu untuk mengelola manajemen sekolah. Kepala sekolah secara otomatis berfungsi sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP).
18. **Komite Sekolah/Madrasah** adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

- b. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI);
- c. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa disekolah swasta.

### **Pasal 5**

- (1) Sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua SD dan SMP, termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Katingan.
- (2) Besarnya biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah, termasuk untuk BOS Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan :
  - 1. SD/SDLB : Rp. 397.000,-/siswa/tahun
  - 2. SMP/SMPLB/SMPT : Rp. 570.000,-/siswa/tahun
- (3) Nama-nama sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **Pasal 6**

Peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas :

- (1) Biaya pribadi peserta didik misalnya uang saku, jajan, buku tulis, alat-alat tulis dan sebagainya;
- (2) Pendanaan sebagian investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional pendidikan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan sekolah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

## **BAB III PENYALURAN, PENGAMBILAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

### **Bagian Pertama**

#### **Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

### **Pasal 7**

- (1) Syarat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah :
  - a. Sekolah yang belum memiliki rekening BOS, harus membuka nomor rekening atas nama sekolah (tidak boleh atas nama pribadi);

- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Up. Manajer Tim Manajemen BOS Kabupaten Katingan);
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan (Tim Manajemen BOS Kabupaten Katingan) melakukan verifikasi dan rekapitulasi nomor rekening dimaksud.

(2) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) :

a. BOS disalurkan secara triwulan (tiga bulanan) yaitu :

1. Triwulan Pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Maret) dilakukan setelah diterimanya alokasi anggaran persekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional pada awal bulan Januari 2011;
2. Triwulan Kedua (bulan April sampai dengan bulan Juni) dilakukan setelah diterimanya alokasi anggaran persekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional pada awal bulan April 2011;
3. Triwulan Ketiga (bulan Juli sampai dengan bulan September) dilakukan setelah diterimanya alokasi anggaran persekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional pada awal bulan Juli 2011;
4. Triwulan Ke-empat (bulan Oktober sampai dengan bulan Desember) dilakukan setelah diterimanya alokasi anggaran persekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional pada awal bulan Oktober 2011;

b. Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan melalui Bendahara pengeluaran pembantu dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Bendahara pengeluaran pembantu :

a. Mengajukan usul penerbitan Surat Permintaan Dana (SPD) ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;

b. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) UP, GU/TU kepada KPA setiap triwulan sesuai alokasi anggaran per sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

c. KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) UP, GU/TU yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) atau BUD untuk menerbitkan SP2D.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) melakukan verifikasi terhadap SPP dan SPM, UP, GU/TU untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan kepada Rekening Kas Daerah.

3. Berdasarkan SP2D yang telah ditertibkan oleh DPPKA maka Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dicairkan dan disalurkan langsung ke rekening sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

4. Jika terdapat kelebihan dan/atau kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah, akibat kesalahan data jumlah siswa, maka sekolah harus mengembalikan kelebihan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut ke rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan, serta melaporkan

kekurangan dana yang diterima, agar diusulkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten.

**Bagian Kedua**  
**Pengambilan dan Penggunaan**  
**Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**

**Pasal 8**

- (1) Pengambilan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan oleh Kepala Sekolah sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (PBPP) dan Bendahara BOS tingkat sekolah.
- (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus diterima secara utuh sesuai yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati ini dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (3) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara bertahap (tiga bulanan). Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

**Pasal 9**

- (1) Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2011, kesepakatan bersama antara pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RKAS/RAPBS).
- (2) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh sekolah, wajib digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Sekolah (PBPP) melaporkan realisasi penggunaan dana yang diterimanya per triwulan dengan memperhatikan rekap SPJ dan dokumen bukti pertanggungjawaban yang sah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya setiap triwulan. Laporan realisasi penggunaan dana dilengkapi dengan penjelasan tentang kelebihan atau kekurangan alokasi dana BOS berdasarkan jumlah siswa di sekolah dengan melampirkan data jumlah murid.
- (4) Realisasi penggunaan dana BOS sesuai dengan jumlah dan bukti-bukti yang sah dicatat dalam Buku Kas Umum oleh kepala sekolah (PBPP), yang menjadi dasar bagi Bendahara pengeluaran pembantu di Dinas Pendidikan mengelompokkan realisasi anggaran per jenis belanja.

## **Pasal 10**

Ketentuan peraturan pajak dalam penggunaan dana BOS diatur sesuai perundangan atas :

- (1) Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan BOS untuk pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, pembelian barang habis pakai.
- (2) Kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS untuk pembelian/penggandaan buku teks pelajaran dan/atau mengganti buku teks pelajaran yang rusak.
- (3) Kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan pemberian honor pada kegiatan penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS dan kegiatan pembelajaran.
- (4) Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan dana BOS dalam rangka membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah yang tidak dibiayai oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah secara bulanan.
- (5) Kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan penggunaan dana BOS, untuk membayar honor kepada tenaga kerja lepas orang pribadi dalam melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan sekolah.

## **BAB IV**

### **LARANGAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

## **Pasal 11**

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilarang :

- (1) Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- (2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
- (3) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar misalnya studi banding dan sejenisnya;
- (4) Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten, atau pihak lainnya, walaupun pihak sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sekolah hanya diperbolehkan menanggung biaya untuk siswa/guru yang ikut dalam kegiatan tersebut;
- (5) Membayar bonus dan transportasi untuk guru;
- (6) Membeli pakaian/seragam untuk guru/siswa untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah);
- (7) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;

- (8) Membangun gedung/ruang baru;
- (9) Digunakan untuk membeli bahan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
- (10) Menanamkan saham;
- (11) Membiayai kegiatan yang dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/daerah secara penuh/secara wajar misalnya guru kontrak/guru bantu;
- (12) Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
- (13) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota dan Kementerian Pendidikan Nasional.

## **BAB V**

### **MONITORING, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)**

#### **Pasal 12**

Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten. Monitoring internal ini bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan *monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan program BOS.*

#### **Pasal 13**

Monitoring eksternal dapat dilakukan oleh Balitbang atau lembaga independen lainnya yang kompeten. Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisa terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk memperbaiki program.

#### **Pasal 14**

Komponen utama yang dimonitoring antara lain :

- a. Alokasi dana sekolah penerima bantuan;
- b. Penyaluran dan penggunaan dana;
- c. Pelayanan dan pengajuan pengaduan;
- d. Administrasi keuangan;
- e. Pelaporan.

## **Pasal 15**

Tim Manajemen BOS Kabupaten perlu melaporkan :

(1) Hasil Penyerapan Dana Bantuan

Berisi tentang besar dana yang disalurkan untuk setiap jenjang pendidikan, jenis sekolah, status sekolah, serta berapa yang telah terserap.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi

Laporan monitoring yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten berisi tentang jumlah responden, waktu pelaksanaan, hasil monitoring, analisis, kesimpulan, saran dan rekomendasi dikirim ke Tim Manajemen BOS Provinsi paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan.

(3) Penanganan pengaduan masyarakat

Tim Manajemen BOS Kabupaten merekapitulasi hasil penanganan pengaduan dan perkembangannya baik yang dilakukan oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten maupun Sekolah.

## **Pasal 16**

Hal yang perlu dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten dan/atau didokumentasi oleh sekolah meliputi berkas-berkas sebagai berikut :

- (1) Nama-nama siswa miskin yang dibebaskan dari pungutan sesuai dengan Format BOS-06;
- (2) Jumlah dana yang dikelola oleh sekolah dan catatan penggunaan dana (BOS-K2);
- (3) Lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran (Format BOS-07);
- (4) Lembar pencatatan pengaduan (Format BOS-08);

Khusus untuk laporan pembelian buku BSE, ada beberapa format laporan yaitu : Penyerapan dan pemanfaatan dana;

- a. Format BOS-09 dibuat oleh sekolah yang diisi daftar buku yang dibeli oleh sekolah.
- b. Format BOS-10 dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli oleh sekolah.

## **BAB VI PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 17**

- (1) Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dalam masing-masing instansi kepada bawahannya, prioritas utama adalah pengawasan terhadap sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pengawasannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan dan Jajaran secara berjenjang.

- (2) Pengawasan fungsional internal yaitu pengawasan program BOS secara internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Depdiknas, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Katingan. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- (3) Pengawasan eksternal yang akan melakukan pengawasan program BOS adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
- (4) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pemeriksaan terhadap program BOS.
- (4) Pengawasan masyarakat adalah dalam rangka transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten, provinsi dan pusat.

### **Pasal 18**

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau siswa yang akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk :

- (1) Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja).
- (2) Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi, yaitu pengembalian dana BOS yang terbukti disalahgunakan kepada satuan pendidikan dan atau ke kas daerah.
- (3) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti malakukan penyimpangan dana BOS.
- (4) Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN tahun berikutnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan sekolah, bila mana terbukti pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok dan golongan.

## **BAB VII. KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati;

**BAB VIII.  
PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada Tanggal 28 MARET 2011.

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada Tanggal 28 MARET 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 4**

Lampiran I : Peraturan Bupati Katingan

Nomor : 4 Tahun 2011

Tanggal : 28 Maret 2011

Tentang : Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011

Jumlah SD : 194 Sekolah  
 Jumlah SMP : 56 Sekolah  
 Total Belanja : Rp 11.348.539.000,00  
 Belanja Pegawai : Rp 2.269.707.800,00  
 Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.674.269.500,00  
 Belanja Belanja Modal : Rp 3.404.561.700,00

Tabel Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri  
 Kabupaten Katingan  
 Tahun Anggaran 2011

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
(1)	(2)	(3)	(4)	5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	
				Rp 11.348.539.000,00	Rp 5.674.269.500,00	Rp 3.404.561.700,00	
				100,00	50,00	50,00	
				(5)	(6)	(8)	
I.	SEKOLAH DASAR :						
1	SDN 1 Tbg. Sanamang	118	Rp 397.000,00	Rp 9.369.200,00	Rp 23.423.000,00	Rp 14.053.800,00	
2	SDN Tumbang Jiga	95	Rp 397.000,00	Rp 7.543.000,00	Rp 18.857.500,00	Rp 11.314.500,00	
3	SDN 1 Tumbang Mahop	124	Rp 397.000,00	Rp 9.845.600,00	Rp 24.614.000,00	Rp 14.768.400,00	

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	SDN Rantau Pandan	120	Rp 397.000,00	Rp 47.640.000,00	Rp 9.528.000,00	Rp 23.820.000,00	Rp 14.292.000,00
5	SDN Rantau Bahai	110	Rp 397.000,00	Rp 43.670.000,00	Rp 8.734.000,00	Rp 21.835.000,00	Rp 13.101.000,00
6	SDN Rantau Puka	59	Rp 397.000,00	Rp 23.423.000,00	Rp 4.684.600,00	Rp 11.711.500,00	Rp 7.026.900,00
7	SDN Dehes Asem	26	Rp 397.000,00	Rp 10.322.000,00	Rp 2.064.400,00	Rp 5.161.000,00	Rp 3.095.600,00
8	SDN Penda Tanggaring	92	Rp 397.000,00	Rp 36.524.000,00	Rp 7.304.800,00	Rp 18.262.000,00	Rp 10.957.200,00
9	SDN Tbg. Labaning	74	Rp 397.000,00	Rp 29.378.000,00	Rp 5.875.600,00	Rp 14.689.000,00	Rp 8.813.400,00
10	SDN Tumbang Gaei	118	Rp 397.000,00	Rp 46.846.000,00	Rp 9.369.200,00	Rp 23.423.000,00	Rp 14.053.800,00
11	SDN Rangan Bahebang	21	Rp 397.000,00	Rp 8.337.000,00	Rp 1.667.400,00	Rp 4.168.500,00	Rp 2.501.100,00
12	SDN 2 Tbg. Sanamang	248	Rp 397.000,00	Rp 98.456.000,00	Rp 19.691.200,00	Rp 49.228.000,00	Rp 29.536.800,00
13	SDN 2 Tumbang Mahop	65	Rp 397.000,00	Rp 25.805.000,00	Rp 5.161.000,00	Rp 12.902.500,00	Rp 7.741.500,00
14	SDN Tbg. Kajamei	76	Rp 397.000,00	Rp 30.172.000,00	Rp 6.034.400,00	Rp 15.086.000,00	Rp 9.051.600,00
15	SDN Tumbang Karuei	113	Rp 397.000,00	Rp 44.861.000,00	Rp 8.972.200,00	Rp 22.430.500,00	Rp 13.458.300,00
16	SDN Rangan Kawit	74	Rp 397.000,00	Rp 29.378.000,00	Rp 5.875.600,00	Rp 14.689.000,00	Rp 8.813.400,00
17	SDN Tumbang Dahuei	81	Rp 397.000,00	Rp 32.157.000,00	Rp 6.431.400,00	Rp 16.078.500,00	Rp 9.647.100,00
18	SDN Kuluk Sepangi	50	Rp 397.000,00	Rp 19.850.000,00	Rp 3.970.000,00	Rp 9.925.000,00	Rp 5.955.000,00
19	SDN Tbg. Mangketai	43	Rp 397.000,00	Rp 17.071.000,00	Rp 3.414.200,00	Rp 8.535.500,00	Rp 5.121.300,00
20	SDN Sei Nanjan	49	Rp 397.000,00	Rp 19.453.000,00	Rp 3.890.600,00	Rp 9.726.500,00	Rp 5.835.900,00
21	SDN Batu Bango	22	Rp 397.000,00	Rp 8.734.000,00	Rp 1.746.800,00	Rp 4.367.000,00	Rp 2.620.200,00
22	SDN Tbg. Hangei II	96	Rp 397.000,00	Rp 38.112.000,00	Rp 7.622.400,00	Rp 19.056.000,00	Rp 11.433.600,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	SDN Tanjung Baik	43	Rp 397.000,00	Rp 17.071.000,00	Rp 3.414.200,00	Rp 8.535.500,00	Rp 5.121.300,00
24	SDN Tbg. Katurai	69	Rp 397.000,00	Rp 27.393.000,00	Rp 5.478.600,00	Rp 13.696.500,00	Rp 8.217.900,00
25	SDN Tumbang Kual	36	Rp 397.000,00	Rp 14.292.000,00	Rp 2.858.400,00	Rp 7.146.000,00	Rp 4.287.600,00
26	SDN Tbg. Katayan	20	Rp 397.000,00	Rp 7.940.000,00	Rp 1.588.000,00	Rp 3.970.000,00	Rp 2.382.000,00
27	SDN Kiham Batang	65	Rp 397.000,00	Rp 25.805.000,00	Rp 5.161.000,00	Rp 12.902.500,00	Rp 7.741.500,00
28	SDN Rangan Ranjing	42	Rp 397.000,00	Rp 16.674.000,00	Rp 3.334.800,00	Rp 8.337.000,00	Rp 5.002.200,00
29	SDN Tbg. Salaman	42	Rp 397.000,00	Rp 16.674.000,00	Rp 3.334.800,00	Rp 8.337.000,00	Rp 5.002.200,00
30	SDN Tbg. Manangei	41	Rp 397.000,00	Rp 16.277.000,00	Rp 3.255.400,00	Rp 8.138.500,00	Rp 4.883.100,00
31	SDN Tbg. Sabetung	37	Rp 397.000,00	Rp 14.689.000,00	Rp 2.937.800,00	Rp 7.344.500,00	Rp 4.406.700,00
32	SDN Rangan Tangko	148	Rp 397.000,00	Rp 58.756.000,00	Rp 11.751.200,00	Rp 29.378.000,00	Rp 17.626.800,00
33	SDN Tbg. Bemban	94	Rp 397.000,00	Rp 37.318.000,00	Rp 7.463.600,00	Rp 18.659.000,00	Rp 11.195.400,00
34	SDN Tumbang Dakei	72	Rp 397.000,00	Rp 28.584.000,00	Rp 5.716.800,00	Rp 14.292.000,00	Rp 8.575.200,00
35	SDN 1 Tumbang Hiran	146	Rp 397.000,00	Rp 57.962.000,00	Rp 11.592.400,00	Rp 28.981.000,00	Rp 17.388.600,00
36	SDN Buntut Leleng	64	Rp 397.000,00	Rp 25.408.000,00	Rp 5.081.600,00	Rp 12.704.000,00	Rp 7.622.400,00
37	SDN Tbg. Malawan	73	Rp 397.000,00	Rp 28.981.000,00	Rp 5.796.200,00	Rp 14.490.500,00	Rp 8.694.300,00
38	SDN Batu Panahan	38	Rp 397.000,00	Rp 15.086.000,00	Rp 3.017.200,00	Rp 7.543.000,00	Rp 4.525.800,00
39	SDN Tbg. Mandurei	43	Rp 397.000,00	Rp 17.071.000,00	Rp 3.414.200,00	Rp 8.535.500,00	Rp 5.121.300,00
40	SDN Tumbang Taei	24	Rp 397.000,00	Rp 9.528.000,00	Rp 1.905.600,00	Rp 4.764.000,00	Rp 2.858.400,00
41	SDN Tumbang Paku	58	Rp 397.000,00	Rp 23.026.000,00	Rp 4.605.200,00	Rp 11.513.000,00	Rp 6.907.800,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Rp 11.348.539.000,00	Rp 2.269.707.800,00	Rp 5.674.269.500,00	Rp 3.404.561.700,00
				100,00	20,00	50,00	30,00
42	SDN Rangan Surai	75	Rp 397.000,00	Rp 29.775.000,00	Rp 5.955.000,00	Rp 14.887.500,00	Rp 8.932.500,00
43	SDN Rangan Burih	55	Rp 397.000,00	Rp 21.835.000,00	Rp 4.367.000,00	Rp 10.917.500,00	Rp 6.550.500,00
44	SDN Kuluk Leleng	19	Rp 397.000,00	Rp 7.543.000,00	Rp 1.508.600,00	Rp 3.771.500,00	Rp 2.262.900,00
45	SDN Tbg. Patane	87	Rp 397.000,00	Rp 34.539.000,00	Rp 6.907.800,00	Rp 17.269.500,00	Rp 10.361.700,00
46	SDN Tbg. Tabulus	78	Rp 397.000,00	Rp 30.966.000,00	Rp 6.193.200,00	Rp 15.483.000,00	Rp 9.289.800,00
47	SDN Tumbang Tundu	37	Rp 397.000,00	Rp 14.689.000,00	Rp 2.937.800,00	Rp 7.344.500,00	Rp 4.405.700,00
48	SDN Tumbang Lambi	22	Rp 397.000,00	Rp 8.734.000,00	Rp 1.746.800,00	Rp 4.367.000,00	Rp 2.620.200,00
49	SDN 2 Tumbang Hiran	52	Rp 397.000,00	Rp 20.644.000,00	Rp 4.128.800,00	Rp 10.322.000,00	Rp 6.193.200,00
50	SDN 1 Tbg. Manggu	75	Rp 397.000,00	Rp 29.775.000,00	Rp 5.955.000,00	Rp 14.887.500,00	Rp 8.932.500,00
51	SDN 2 Tbg. Manggu	104	Rp 397.000,00	Rp 41.288.000,00	Rp 8.257.600,00	Rp 20.644.000,00	Rp 12.385.400,00
52	SDN 1 Rt. Bangkiang	160	Rp 397.000,00	Rp 63.520.000,00	Rp 12.704.000,00	Rp 31.760.000,00	Rp 19.055.000,00
53	SDN 1 Dehes	63	Rp 397.000,00	Rp 25.011.000,00	Rp 5.002.200,00	Rp 12.505.500,00	Rp 7.503.300,00
54	SDN 1 Tbg. Pangka	64	Rp 397.000,00	Rp 25.408.000,00	Rp 5.081.600,00	Rp 12.704.000,00	Rp 7.622.400,00
55	SDN 1 Tbg. Tarane	74	Rp 397.000,00	Rp 29.378.000,00	Rp 5.875.600,00	Rp 14.689.000,00	Rp 8.813.400,00
56	SDN 1 Tbg. Kawei	98	Rp 397.000,00	Rp 38.906.000,00	Rp 7.781.200,00	Rp 19.453.000,00	Rp 11.671.800,00
57	SDN 1 Kamantu	46	Rp 397.000,00	Rp 18.262.000,00	Rp 3.652.400,00	Rp 9.131.000,00	Rp 5.478.600,00
58	SDN Tumbang Baraoi	97	Rp 397.000,00	Rp 38.509.000,00	Rp 7.701.800,00	Rp 19.254.500,00	Rp 11.552.700,00
59	SDN Tumbang Atei	167	Rp 397.000,00	Rp 66.299.000,00	Rp 13.259.800,00	Rp 33.149.500,00	Rp 19.889.700,00
60	SDN Tumbang Kaman	276	Rp 397.000,00	Rp 109.572.000,00	Rp 21.914.400,00	Rp 54.786.000,00	Rp 32.871.600,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
				Rp	Rp	Rp	Rp
				100,00	50,00	30,00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	
61	SDN Tumbang Jala	132	Rp 397.000,00	52.404.000,00	Rp 26.202.000,00	Rp 15.721.200,00	
62	SDN Kuluk Habuhus	145	Rp 397.000,00	57.565.000,00	Rp 28.782.500,00	Rp 17.269.500,00	
63	SDN Tumbang Papi	38	Rp 397.000,00	15.086.000,00	Rp 7.543.000,00	Rp 4.525.800,00	
64	SDN Batu Tukan	66	Rp 397.000,00	26.202.000,00	Rp 13.101.000,00	Rp 7.860.600,00	
65	SDN Tumbang Tangoi	66	Rp 397.000,00	26.202.000,00	Rp 13.101.000,00	Rp 7.860.600,00	
66	SDN Tbg. Hebangoi	136	Rp 397.000,00	53.992.000,00	Rp 26.996.000,00	Rp 16.197.600,00	
67	SDN 1 Dya. Manunggal	31	Rp 397.000,00	12.307.000,00	Rp 6.153.500,00	Rp 3.692.100,00	
68	SDN 1 Tbg. Labehu	51	Rp 397.000,00	20.247.000,00	Rp 10.123.500,00	Rp 6.074.100,00	
69	SDN Nusa Kutau	89	Rp 397.000,00	36.333.000,00	Rp 17.666.500,00	Rp 10.599.900,00	
70	SDN Batu Batak	45	Rp 397.000,00	17.865.000,00	Rp 8.932.500,00	Rp 5.359.500,00	
71	SDN 1 Tbg. Lahang	67	Rp 397.000,00	26.599.000,00	Rp 13.299.500,00	Rp 7.979.700,00	
72	SDN 2 Tbg. Lahang	62	Rp 397.000,00	24.614.000,00	Rp 12.307.000,00	Rp 7.384.200,00	
73	SDN 3 Tbg. Lahang	54	Rp 397.000,00	21.438.000,00	Rp 10.719.000,00	Rp 6.431.400,00	
74	SDN Tewang Panjang	52	Rp 397.000,00	20.644.000,00	Rp 10.322.000,00	Rp 6.193.200,00	
75	SDN Telok	176	Rp 397.000,00	69.872.000,00	Rp 34.936.000,00	Rp 20.961.600,00	
76	SDN 1 Samba Danum	229	Rp 397.000,00	90.913.000,00	Rp 45.456.500,00	Rp 27.273.900,00	
77	SDN 2 Samba Danum	169	Rp 397.000,00	67.093.000,00	Rp 33.516.500,00	Rp 20.127.900,00	
78	SDN 3 Samba Danum	180	Rp 397.000,00	71.460.000,00	Rp 35.730.000,00	Rp 21.438.000,00	
79	SDN 4 Samba Danum	145	Rp 397.000,00	57.565.000,00	Rp 28.782.500,00	Rp 17.269.500,00	

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja			
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
80	SDN 1 Sb. Kahayan	174	Rp 397.000,00	Rp 69.078.000,00	Rp 13.815.600,00	Rp 34.539.000,00	Rp 20.723.400,00	
81	SDN 2 Sb. Kahayan	152	Rp 397.000,00	Rp 60.344.000,00	Rp 12.068.800,00	Rp 30.172.000,00	Rp 18.103.200,00	
82	SDN 3 Samba Kahayan	21	Rp 397.000,00	Rp 8.337.000,00	Rp 1.667.400,00	Rp 4.168.500,00	Rp 2.501.100,00	
83	SDN 1 Samba Bakumpai	153	Rp 397.000,00	Rp 62.726.000,00	Rp 12.543.200,00	Rp 31.363.000,00	Rp 18.817.800,00	
84	SDN 2 Samba Bakumpai	30	Rp 397.000,00	Rp 11.910.000,00	Rp 2.382.000,00	Rp 5.955.000,00	Rp 3.573.000,00	
85	SDN 1 Samba Katung	205	Rp 397.000,00	Rp 81.385.000,00	Rp 16.277.000,00	Rp 40.692.500,00	Rp 24.415.500,00	
86	SDN 2 Samba Katung	232	Rp 397.000,00	Rp 92.104.000,00	Rp 18.420.800,00	Rp 46.052.000,00	Rp 27.631.200,00	
87	SDN Napu Sahu	52	Rp 397.000,00	Rp 20.844.000,00	Rp 4.128.800,00	Rp 10.322.000,00	Rp 6.193.200,00	
88	SDN Batu Badinding	218	Rp 397.000,00	Rp 86.546.000,00	Rp 17.309.200,00	Rp 43.273.000,00	Rp 25.963.800,00	
89	SDN Rantau Asem	219	Rp 397.000,00	Rp 86.943.000,00	Rp 17.388.600,00	Rp 43.471.500,00	Rp 26.082.900,00	
90	SDN Tumbang Kalemel	214	Rp 397.000,00	Rp 84.988.000,00	Rp 16.991.600,00	Rp 42.479.000,00	Rp 25.487.400,00	
91	SDN Tumbang Marak	285	Rp 397.000,00	Rp 113.145.000,00	Rp 22.629.000,00	Rp 56.572.500,00	Rp 33.943.500,00	
92	SDN Tumbang Hangei I	86	Rp 397.000,00	Rp 34.142.000,00	Rp 6.823.400,00	Rp 17.071.000,00	Rp 10.242.600,00	
93	SDN Tumbang Pariyey	66	Rp 397.000,00	Rp 26.202.000,00	Rp 5.240.400,00	Rp 13.101.000,00	Rp 7.860.600,00	
94	SDN 1 Tumbang Mirah	115	Rp 397.000,00	Rp 45.655.000,00	Rp 9.131.000,00	Rp 22.827.500,00	Rp 13.696.500,00	
95	SDN Tewang Papari	60	Rp 397.000,00	Rp 23.320.000,00	Rp 4.764.000,00	Rp 11.910.000,00	Rp 7.146.000,00	
96	SDN Tewang Darayu	62	Rp 397.000,00	Rp 24.614.000,00	Rp 4.922.800,00	Rp 12.307.000,00	Rp 7.384.200,00	
97	SDN Buntut Bali	90	Rp 397.000,00	Rp 36.730.000,00	Rp 7.146.000,00	Rp 17.865.000,00	Rp 10.719.000,00	
98	SDN Kuluk Bali	46	Rp 397.000,00	Rp 18.262.000,00	Rp 3.652.400,00	Rp 9.131.000,00	Rp 5.478.600,00	

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98	SDN Manduring Taheta	70	Rp 397.000,00	Rp 27.790.000,00	Rp 5.558.000,00	Rp 13.895.000,00	Rp 8.337.000,00
100	SDN Manduring Lama	43	Rp 397.000,00	Rp 17.071.000,00	Rp 3.414.200,00	Rp 8.535.500,00	Rp 5.121.300,00
101	SDN Tumbang Banjang	76	Rp 397.000,00	Rp 30.172.000,00	Rp 6.034.400,00	Rp 15.086.000,00	Rp 9.051.600,00
102	SDN Tumbang Lawang	46	Rp 397.000,00	Rp 18.262.000,00	Rp 3.652.400,00	Rp 9.131.000,00	Rp 5.478.600,00
103	SDN Dahlan Tunggal	280	Rp 397.000,00	Rp 111.160.000,00	Rp 22.232.000,00	Rp 55.580.000,00	Rp 33.348.000,00
104	SDN Tewang Karang	64	Rp 397.000,00	Rp 25.408.000,00	Rp 5.081.600,00	Rp 12.704.000,00	Rp 7.622.400,00
105	SDN Tumbang Tungku	163	Rp 397.000,00	Rp 64.711.000,00	Rp 12.942.200,00	Rp 32.352.500,00	Rp 19.413.300,00
106	SDN Geragu	56	Rp 397.000,00	Rp 22.232.000,00	Rp 4.445.400,00	Rp 11.116.000,00	Rp 6.669.600,00
107	SDN Tumbang Tanjung	150	Rp 397.000,00	Rp 59.550.000,00	Rp 11.910.000,00	Rp 29.775.000,00	Rp 17.865.000,00
108	SDN UPT-SPT-SP.1.P.Malan	86	Rp 397.000,00	Rp 34.142.000,00	Rp 6.828.400,00	Rp 17.071.000,00	Rp 10.242.600,00
109	SDN UPT-SPT-SP.2.P.Malan	89	Rp 397.000,00	Rp 35.333.000,00	Rp 7.065.600,00	Rp 17.665.500,00	Rp 10.599.900,00
110	SDN Tewang Beringin	159	Rp 397.000,00	Rp 63.123.000,00	Rp 12.624.500,00	Rp 31.561.500,00	Rp 18.936.500,00
111	SDN Hapalam	103	Rp 397.000,00	Rp 40.891.000,00	Rp 8.178.200,00	Rp 20.445.500,00	Rp 12.267.300,00
112	SDN Tewang Rangas	75	Rp 397.000,00	Rp 29.775.000,00	Rp 5.955.000,00	Rp 14.887.500,00	Rp 8.932.500,00
113	SDN Bangkuang	64	Rp 397.000,00	Rp 25.408.000,00	Rp 5.081.600,00	Rp 12.704.000,00	Rp 7.622.400,00
114	SDN Tarusan Danum	84	Rp 397.000,00	Rp 33.348.000,00	Rp 6.669.600,00	Rp 16.674.000,00	Rp 10.004.400,00
115	SDN 1 Pendahara	90	Rp 397.000,00	Rp 35.730.000,00	Rp 7.146.000,00	Rp 17.865.000,00	Rp 10.719.000,00
116	SDN 2 Pendahara	179	Rp 397.000,00	Rp 71.063.000,00	Rp 14.212.600,00	Rp 35.531.500,00	Rp 21.318.900,00
117	SDN 3 Pendahara	106	Rp 397.000,00	Rp 42.082.000,00	Rp 8.416.400,00	Rp 21.041.000,00	Rp 12.624.600,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
118	SDN Tumbang Tarusan	130	Rp 397.000,00	Rp 51.610.000,00	Rp 10.322.000,00	Rp 25.805.000,00	Rp 15.483.000,00
119	SDN 1 Twg. Rangkang	95	Rp 397.000,00	Rp 37.715.000,00	Rp 7.543.000,00	Rp 18.857.500,00	Rp 11.314.500,00
120	SDN 2 Twg. Rangkang	79	Rp 397.000,00	Rp 31.363.000,00	Rp 6.272.600,00	Rp 15.681.500,00	Rp 9.408.900,00
121	SDN Twg. Manyang	106	Rp 397.000,00	Rp 42.082.000,00	Rp 8.416.400,00	Rp 21.041.000,00	Rp 12.624.600,00
122	SDN 1 Kasongan Baru	235	Rp 397.000,00	Rp 93.295.000,00	Rp 18.659.000,00	Rp 46.647.500,00	Rp 27.988.500,00
123	SDN 2 Kasongan Baru	155	Rp 397.000,00	Rp 61.535.000,00	Rp 12.307.000,00	Rp 30.767.500,00	Rp 18.460.500,00
124	SDN 3 Kasongan Baru	287	Rp 397.000,00	Rp 113.939.000,00	Rp 22.787.800,00	Rp 56.969.500,00	Rp 34.181.700,00
125	SDN 4 Kasongan Baru	165	Rp 397.000,00	Rp 65.505.000,00	Rp 13.101.000,00	Rp 32.752.500,00	Rp 19.651.500,00
126	SDN 1 Kasongan Lama	249	Rp 397.000,00	Rp 98.853.000,00	Rp 19.770.600,00	Rp 49.426.500,00	Rp 29.655.900,00
127	SDN 2 Kasongan Lama	68	Rp 397.000,00	Rp 26.996.000,00	Rp 5.399.200,00	Rp 13.498.000,00	Rp 8.098.800,00
128	SDN 3 Kasongan Lama	297	Rp 397.000,00	Rp 117.909.000,00	Rp 23.581.800,00	Rp 58.954.500,00	Rp 35.372.700,00
129	SDN 4 Kasongan Lama	79	Rp 397.000,00	Rp 31.363.000,00	Rp 6.272.600,00	Rp 15.681.500,00	Rp 9.408.900,00
130	SDN Tumbang Liting	66	Rp 397.000,00	Rp 26.202.000,00	Rp 5.240.400,00	Rp 13.101.000,00	Rp 7.860.600,00
131	SDN Tewang Kadamba	60	Rp 397.000,00	Rp 23.820.000,00	Rp 4.764.000,00	Rp 11.910.000,00	Rp 7.146.000,00
132	SDN Talian Kereng	175	Rp 397.000,00	Rp 69.475.000,00	Rp 13.895.000,00	Rp 34.737.500,00	Rp 20.842.500,00
133	SDN Barut Kalanaman	55	Rp 397.000,00	Rp 21.835.000,00	Rp 4.367.000,00	Rp 10.917.500,00	Rp 6.550.500,00
134	SDN 1 Telangkah	180	Rp 397.000,00	Rp 71.460.000,00	Rp 14.292.000,00	Rp 35.730.000,00	Rp 21.438.000,00
135	SDN 2 Telangkah	175	Rp 397.000,00	Rp 69.475.000,00	Rp 13.895.000,00	Rp 34.737.500,00	Rp 20.842.500,00
136	SDN 3 Telangkah	810	Rp 397.000,00	Rp 321.570.000,00	Rp 64.314.000,00	Rp 160.785.000,00	Rp 96.471.000,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
				Rp 11.348.539.000,00	Rp 2.269.707.800,00	Rp 5.674.269.500,00	Rp 3.404.561.700,00
				100,00	20,00	50,00	30,00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
137	SDN 4 Telangkah	113	Rp 397.000,00	Rp 44.861.000,00	Rp 8.972.200,00	Rp 22.430.500,00	Rp 13.458.300,00
138	SDN 5 Telangkah	346	Rp 397.000,00	Rp 137.362.000,00	Rp 27.472.400,00	Rp 68.681.000,00	Rp 41.208.600,00
139	SDN Hampangan	67	Rp 397.000,00	Rp 26.598.000,00	Rp 5.319.800,00	Rp 13.299.500,00	Rp 7.979.700,00
140	SLB Negeri 1 Katingan Hilir	25	Rp 397.000,00	Rp 9.925.000,00	Rp 1.985.000,00	Rp 4.962.500,00	Rp 2.977.500,00
141	SDN Petak Bahandang	223	Rp 397.000,00	Rp 88.531.000,00	Rp 17.705.200,00	Rp 44.265.500,00	Rp 26.559.300,00
142	SDN Talingke	53	Rp 397.000,00	Rp 21.041.000,00	Rp 4.208.200,00	Rp 10.520.500,00	Rp 6.312.300,00
143	SDN Handiwung	85	Rp 397.000,00	Rp 33.745.000,00	Rp 6.749.000,00	Rp 16.872.500,00	Rp 10.123.500,00
144	SDN Tumbang Panggo	75	Rp 397.000,00	Rp 29.775.000,00	Rp 5.955.000,00	Rp 14.887.500,00	Rp 8.932.500,00
145	SDN Tewang Tampang	156	Rp 397.000,00	Rp 61.932.000,00	Rp 12.385.400,00	Rp 30.966.000,00	Rp 18.579.600,00
146	SDN Luwuk Kanan	151	Rp 397.000,00	Rp 59.947.000,00	Rp 11.989.400,00	Rp 29.973.500,00	Rp 17.984.100,00
147	SDN Hiang Bana	9	Rp 397.000,00	Rp 3.573.000,00	Rp 714.600,00	Rp 1.786.500,00	Rp 1.071.900,00
148	SDN Luwuk Kiri	45	Rp 397.000,00	Rp 17.865.000,00	Rp 3.573.000,00	Rp 8.932.500,00	Rp 5.359.500,00
149	SDN Baun Bango	100	Rp 397.000,00	Rp 39.700.000,00	Rp 7.940.000,00	Rp 19.850.000,00	Rp 11.910.000,00
150	SDN Asem Kumbang	183	Rp 397.000,00	Rp 72.651.000,00	Rp 14.530.200,00	Rp 36.325.500,00	Rp 21.795.300,00
151	SDN Tumbang Runen	56	Rp 397.000,00	Rp 22.232.000,00	Rp 4.446.400,00	Rp 11.116.000,00	Rp 6.669.600,00
152	SDN Jahanjang	90	Rp 397.000,00	Rp 35.730.000,00	Rp 7.146.000,00	Rp 17.865.000,00	Rp 10.719.000,00
153	SDN Telaga	184	Rp 397.000,00	Rp 73.048.000,00	Rp 14.609.600,00	Rp 36.524.000,00	Rp 21.914.400,00
154	SDN Tampelas	79	Rp 397.000,00	Rp 31.363.000,00	Rp 6.272.600,00	Rp 15.681.500,00	Rp 9.408.900,00
155	SDN 1 Gallingang	144	Rp 397.000,00	Rp 57.168.000,00	Rp 11.433.600,00	Rp 28.584.000,00	Rp 17.150.400,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
				Rp 11.348.599.000,00	Rp 2.269.707.800,00	Rp 5.674.269.500,00	Rp 3.404.561.700,00
				100,00	20,00	90,00	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
156	SDN 2 Galinggang	30	Rp 397.000,00	Rp 11.910.000,00	Rp 2.382.000,00	Rp 5.955.000,00	Rp 3.573.000,00
157	SDN 3 Galinggang	41	Rp 397.000,00	Rp 16.277.000,00	Rp 3.255.400,00	Rp 8.138.500,00	Rp 4.883.100,00
158	SDN Keruing	84	Rp 397.000,00	Rp 33.348.000,00	Rp 6.669.600,00	Rp 16.674.000,00	Rp 10.004.400,00
159	SDN Perupuk	18	Rp 397.000,00	Rp 7.146.000,00	Rp 1.429.200,00	Rp 3.573.000,00	Rp 2.143.800,00
160	SDN-1 Mendawai	81	Rp 397.000,00	Rp 32.157.000,00	Rp 6.431.400,00	Rp 16.078.500,00	Rp 9.647.100,00
161	SDN-2 Mendawai	100	Rp 397.000,00	Rp 39.700.000,00	Rp 7.940.000,00	Rp 19.850.000,00	Rp 11.910.000,00
162	SDN-3 Mendawai	67	Rp 397.000,00	Rp 26.599.000,00	Rp 5.319.800,00	Rp 13.299.500,00	Rp 7.979.700,00
163	SDN Teluk Sebulu	44	Rp 397.000,00	Rp 17.468.000,00	Rp 3.493.600,00	Rp 8.734.000,00	Rp 5.240.400,00
164	SDN Mekar Tanj	123	Rp 397.000,00	Rp 48.831.000,00	Rp 9.765.200,00	Rp 24.415.500,00	Rp 14.649.300,00
165	SDN Kampung Melayu	124	Rp 397.000,00	Rp 49.228.000,00	Rp 9.845.600,00	Rp 24.614.000,00	Rp 14.768.400,00
166	SDN Perigi	70	Rp 397.000,00	Rp 27.790.000,00	Rp 5.558.000,00	Rp 13.895.000,00	Rp 8.337.000,00
167	SDN Tewang Kampung	104	Rp 397.000,00	Rp 41.288.000,00	Rp 8.257.600,00	Rp 20.644.000,00	Rp 12.386.400,00
168	SDN-1 Pegatan Hilir	137	Rp 397.000,00	Rp 54.389.000,00	Rp 10.877.800,00	Rp 27.194.500,00	Rp 16.316.700,00
169	SDN-2 Pegatan Hilir	110	Rp 397.000,00	Rp 43.570.000,00	Rp 8.734.000,00	Rp 21.835.000,00	Rp 13.101.000,00
170	SDN-3 Pegatan Hilir	56	Rp 397.000,00	Rp 22.232.000,00	Rp 4.445.400,00	Rp 11.116.000,00	Rp 6.669.600,00
171	SDN-1 Pegatan Hulu	122	Rp 397.000,00	Rp 48.434.000,00	Rp 9.686.800,00	Rp 24.217.000,00	Rp 14.530.200,00
172	SDN-2 Pegatan Hulu	111	Rp 397.000,00	Rp 44.067.000,00	Rp 8.813.400,00	Rp 22.033.500,00	Rp 13.220.100,00
173	SDN-1 Kpg. Keramat	88	Rp 397.000,00	Rp 34.936.000,00	Rp 6.987.200,00	Rp 17.468.000,00	Rp 10.480.800,00
174	SDN-2 Kpg. Keramat	86	Rp 397.000,00	Rp 34.142.000,00	Rp 6.828.400,00	Rp 17.071.000,00	Rp 10.242.600,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
				Rp 11.348.599.000,00	Rp 2.269.707.800,00	Rp 5.674.269.500,00	Rp 3.404.561.700,00
				100,00	20,00	50,00	30,00
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
175	SDN-1 Kpg. Tengah	96	397.000,00	38.996.000,00	7.781.200,00	19.453.000,00	11.671.800,00
176	SDN-3 Kpg. Tengah	98	397.000,00	38.996.000,00	7.781.200,00	19.453.000,00	11.671.800,00
177	SDN-1 Singam Raya	107	397.000,00	42.479.000,00	8.495.800,00	21.239.500,00	12.743.700,00
178	SDN-1 Padang Jaya	149	397.000,00	59.153.000,00	11.830.600,00	29.576.500,00	17.745.900,00
179	SDN-2 Padang Jaya	111	397.000,00	44.067.000,00	8.813.400,00	22.033.500,00	13.220.100,00
180	SDN-1 Padang Makmur	52	397.000,00	20.644.000,00	4.128.800,00	10.322.000,00	6.193.200,00
181	SDN-2 Padang Makmur	103	397.000,00	40.891.000,00	8.178.200,00	20.445.500,00	12.267.300,00
182	SDN-1 Bumi Indah	114	397.000,00	45.258.000,00	9.051.600,00	22.629.000,00	13.577.400,00
183	SDN-2 Bumi Indah	88	397.000,00	34.936.000,00	6.987.200,00	17.468.000,00	10.480.800,00
184	SDN-1 Bumi Subur	94	397.000,00	37.318.000,00	7.463.600,00	18.659.000,00	11.195.400,00
185	SDN-2 Bumi Subur	67	397.000,00	26.599.000,00	5.319.800,00	13.299.500,00	7.979.700,00
186	SDN-1 Bangun Jaya	150	397.000,00	59.550.000,00	11.910.000,00	29.775.000,00	17.865.000,00
187	SDN-2 Bangun Jaya	105	397.000,00	41.686.000,00	8.337.000,00	20.842.500,00	12.505.500,00
188	SDN-3 Bangun Jaya	53	397.000,00	21.041.000,00	4.208.200,00	10.520.500,00	6.312.300,00
189	SDN-1 Kampung Baru	108	397.000,00	42.876.000,00	8.575.200,00	21.438.000,00	12.862.800,00
190	SDN-3 Kampung Baru	99	397.000,00	39.303.000,00	7.860.600,00	19.651.500,00	11.790.900,00
191	SDN-1 Setia Mulia	93	397.000,00	36.921.000,00	7.384.200,00	18.460.500,00	11.076.300,00
192	SDN-2 Setia Mulia	93	397.000,00	36.921.000,00	7.384.200,00	18.460.500,00	11.076.300,00
193	SDN Sungai Kaki	70	397.000,00	27.790.000,00	5.558.000,00	13.895.000,00	8.337.000,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
194	SDN -1 Sebangau Kecil	110	Rp 397.000,00	Rp 43.670.000,00	Rp 8.734.000,00	Rp 21.835.000,00	Rp 13.101.000,00
	Jumlah 1	20.287		Rp 8.053.939.000,00	Rp 1.610.787.800,00	Rp 4.028.969.500,00	Rp 2.416.181.700,00
II.	SMP :						
1	SMPN 1 Katingan Hulu	224	Rp 570.000,00	Rp 127.680.000,00	Rp 25.536.000,00	Rp 63.840.000,00	Rp 38.304.000,00
2	SMPN 2 Katingan Hulu	51	Rp 570.000,00	Rp 29.070.000,00	Rp 5.814.000,00	Rp 14.535.000,00	Rp 8.721.000,00
3	SMPN 3 Katingan Hulu	68	Rp 570.000,00	Rp 38.760.000,00	Rp 7.752.000,00	Rp 19.380.000,00	Rp 11.628.000,00
4	SMPN 4 Katingan Hulu	65	Rp 570.000,00	Rp 37.050.000,00	Rp 7.410.000,00	Rp 18.525.000,00	Rp 11.115.000,00
5	SMPN Satu Atap 1 Katingan Hulu	45	Rp 570.000,00	Rp 25.650.000,00	Rp 5.130.000,00	Rp 12.825.000,00	Rp 7.695.000,00
6	SMPN Satu Atap 2 Katingan Hulu	25	Rp 570.000,00	Rp 14.250.000,00	Rp 2.850.000,00	Rp 7.125.000,00	Rp 4.275.000,00
7	SMPN Satu Atap 3 Katingan Hulu	49	Rp 570.000,00	Rp 27.930.000,00	Rp 5.566.000,00	Rp 13.965.000,00	Rp 8.379.000,00
8	SMPN Satu Atap 4 Katingan Hulu	39	Rp 570.000,00	Rp 22.230.000,00	Rp 4.446.000,00	Rp 11.115.000,00	Rp 6.669.000,00
9	SMPN Satu Atap 5 Katingan Hulu	52	Rp 570.000,00	Rp 29.640.000,00	Rp 5.928.000,00	Rp 14.820.000,00	Rp 8.892.000,00
10	SMPN Satu Atap 6 Katingan Hulu	18	Rp 570.000,00	Rp 10.260.000,00	Rp 2.052.000,00	Rp 5.130.000,00	Rp 3.078.000,00
11	SMPN 1 Marikit	219	Rp 570.000,00	Rp 124.830.000,00	Rp 24.966.000,00	Rp 62.415.000,00	Rp 37.449.000,00
12	SMPN 2 Marikit	57	Rp 570.000,00	Rp 32.490.000,00	Rp 6.498.000,00	Rp 15.245.000,00	Rp 9.747.000,00
13	SMPN Satu Atap 1 Marikit	31	Rp 570.000,00	Rp 17.670.000,00	Rp 3.534.000,00	Rp 8.835.000,00	Rp 5.301.000,00
14	SMPN Satu Atap 2 Marikit	26	Rp 570.000,00	Rp 14.820.000,00	Rp 2.964.000,00	Rp 7.410.000,00	Rp 4.446.000,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	SMPN Satu Atap 6 Maritani	17	Rp 570.000,00	Rp 9.690.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 2.907.000,00
16	SMPN 1 Sanaman Mantikeli	124	Rp 570.000,00	Rp 70.680.000,00	Rp 14.136.000,00	Rp 35.340.000,00	Rp 21.204.000,00
17	SMPN 2 Sanaman Mantikeli	81	Rp 570.000,00	Rp 46.170.000,00	Rp 9.234.000,00	Rp 23.085.000,00	Rp 13.851.000,00
18	SMPN Satu Atap 1 Sanaman Mantikeli	60	Rp 570.000,00	Rp 34.200.000,00	Rp 6.840.000,00	Rp 17.100.000,00	Rp 10.260.000,00
19	SMPN Satu Atap 2 Sanaman Mantikeli	47	Rp 570.000,00	Rp 26.790.000,00	Rp 5.358.000,00	Rp 13.395.000,00	Rp 8.037.000,00
20	SMPN Satu Atap 3 Sanaman Mantikeli	33	Rp 570.000,00	Rp 18.810.000,00	Rp 3.762.000,00	Rp 9.405.000,00	Rp 5.643.000,00
21	SMPN 1 Katingan Tengah	357	Rp 570.000,00	Rp 203.490.000,00	Rp 40.698.000,00	Rp 101.745.000,00	Rp 61.047.000,00
22	SMPN 2 Katingan Tengah	171	Rp 570.000,00	Rp 97.470.000,00	Rp 19.494.000,00	Rp 48.735.000,00	Rp 29.241.000,00
23	SMPN 3 Katingan Tengah	155	Rp 570.000,00	Rp 88.350.000,00	Rp 17.670.000,00	Rp 44.175.000,00	Rp 26.505.000,00
24	SMPN 4 Katingan Tengah	121	Rp 570.000,00	Rp 68.970.000,00	Rp 13.794.000,00	Rp 34.485.000,00	Rp 20.691.000,00
25	SD-SMPN 1 Satu Atap Katingan Tengah	40	Rp 570.000,00	Rp 22.800.000,00	Rp 4.560.000,00	Rp 11.400.000,00	Rp 6.840.000,00
26	SD-SMPN 2 Satu Atap Katingan Tengah	45	Rp 570.000,00	Rp 25.650.000,00	Rp 5.130.000,00	Rp 12.825.000,00	Rp 7.695.000,00
27	SMPN Satu Atap 3 Katingan Tengah*)	62	Rp 570.000,00	Rp 35.340.000,00	Rp 7.068.000,00	Rp 17.670.000,00	Rp 10.602.000,00
28	SMPN 1 Pulau Melian	153	Rp 570.000,00	Rp 87.210.000,00	Rp 17.442.000,00	Rp 43.605.000,00	Rp 26.163.000,00
29	SMPN 2 Pulau Melian	176	Rp 570.000,00	Rp 100.320.000,00	Rp 20.064.000,00	Rp 50.160.000,00	Rp 30.096.000,00
30	SMPN 3 Pulau Melian	58	Rp 570.000,00	Rp 33.060.000,00	Rp 6.612.000,00	Rp 16.530.000,00	Rp 9.918.000,00
31	SMPN Satu Atap 1 Pulau Melian *)	17	Rp 570.000,00	Rp 9.690.000,00	Rp 1.938.000,00	Rp 4.845.000,00	Rp 2.907.000,00
32	SMPN Satu Atap 2 Pulau Melian *)	15	Rp 570.000,00	Rp 8.550.000,00	Rp 1.710.000,00	Rp 4.275.000,00	Rp 2.565.000,00
33	SMPN 1 Tewang Sangalang Gating	228	Rp 570.000,00	Rp 128.960.000,00	Rp 25.992.000,00	Rp 64.980.000,00	Rp 38.988.000,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
34	SMPN 2 Tewang Sangalang Garing	54	Rp 570.000,00	Rp 53.580.000,00	Rp 10.716.000,00	Rp 26.790.000,00	Rp 16.074.000,00
35	SMPN 3 Tewang Sangalang Garing	115	Rp 570.000,00	Rp 65.550.000,00	Rp 13.110.000,00	Rp 32.775.000,00	Rp 19.665.000,00
36	SMPN Satu Atap 1 Tewang Sangalang Garing	27	Rp 570.000,00	Rp 15.350.000,00	Rp 3.078.000,00	Rp 7.695.000,00	Rp 4.617.000,00
37	SMPN 1 Katingan Hilir	320	Rp 570.000,00	Rp 296.400.000,00	Rp 59.280.000,00	Rp 148.200.000,00	Rp 88.920.000,00
38	SMPN 2 Katingan Hilir	349	Rp 570.000,00	Rp 198.930.000,00	Rp 39.786.000,00	Rp 99.465.000,00	Rp 59.679.000,00
39	SMPN 3 Katingan Hilir	147	Rp 570.000,00	Rp 83.790.000,00	Rp 16.758.000,00	Rp 41.895.000,00	Rp 25.137.000,00
40	SMPN 4 Katingan Hilir	115	Rp 570.000,00	Rp 65.550.000,00	Rp 13.110.000,00	Rp 32.775.000,00	Rp 19.665.000,00
41	SMPN 5 Katingan Hilir	152	Rp 570.000,00	Rp 86.640.000,00	Rp 17.328.000,00	Rp 43.320.000,00	Rp 25.992.000,00
42	SMPN 1 Tasik Payawan	116	Rp 570.000,00	Rp 66.120.000,00	Rp 13.224.000,00	Rp 33.060.000,00	Rp 19.836.000,00
43	SMPN 2 Tasik Payawan	84	Rp 570.000,00	Rp 47.860.000,00	Rp 9.576.000,00	Rp 23.940.000,00	Rp 14.364.000,00
44	SMPN 1 Kamipang	44	Rp 570.000,00	Rp 25.080.000,00	Rp 5.016.000,00	Rp 12.540.000,00	Rp 7.524.000,00
45	SMPN 2 Kamipang	41	Rp 570.000,00	Rp 23.370.000,00	Rp 4.674.000,00	Rp 11.685.000,00	Rp 7.011.000,00
46	SMPN Satu Atap 1 Kamipang	40	Rp 570.000,00	Rp 22.800.000,00	Rp 4.560.000,00	Rp 11.400.000,00	Rp 6.840.000,00
47	SMPN Satu Atap 2 Kamipang	60	Rp 570.000,00	Rp 34.200.000,00	Rp 6.840.000,00	Rp 17.100.000,00	Rp 10.260.000,00
48	SMPN Satu Atap 3 Kamipang	60	Rp 570.000,00	Rp 34.200.000,00	Rp 6.840.000,00	Rp 17.100.000,00	Rp 10.260.000,00
49	SMPN Satu Atap 4 Kamipang*)	36	Rp 570.000,00	Rp 20.520.000,00	Rp 4.104.000,00	Rp 10.260.000,00	Rp 6.156.000,00
50	SMPN 1 Mendawai	132	Rp 570.000,00	Rp 75.240.000,00	Rp 15.048.000,00	Rp 37.620.000,00	Rp 22.572.000,00
51	SMPN Satu Atap 1 Mendawai	29	Rp 570.000,00	Rp 16.530.000,00	Rp 3.306.000,00	Rp 8.265.000,00	Rp 4.959.000,00
52	SMPN Satu Atap 2 Mendawai	26	Rp 570.000,00	Rp 14.820.000,00	Rp 2.964.000,00	Rp 7.410.000,00	Rp 4.446.000,00

No.	Nama Sekolah	Total Siswa	Harga satuan	Alokasi Anggaran	Jenis Belanja		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal
					5.2.1.	5.2.2.	5.2.3.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
53	SMPN Satu Atap 3 Mendawai	45	Rp 570.000,00	Rp 25.650.000,00	Rp 5.130.000,00	Rp 12.825.000,00	Rp 7.695.000,00
54	SMPN 1 Katingan Kuala	198	Rp 570.000,00	Rp 112.860.000,00	Rp 22.572.000,00	Rp 56.430.000,00	Rp 33.858.000,00
55	SMPN 2 Katingan Kuala	239	Rp 570.000,00	Rp 136.230.000,00	Rp 27.246.000,00	Rp 68.115.000,00	Rp 40.869.000,00
56	SMPN 3 Katingan Kuala	182	Rp 570.000,00	Rp 103.740.000,00	Rp 20.748.000,00	Rp 51.870.000,00	Rp 31.122.000,00
	Jumlah II	5.780		Rp 3.294.600.000,00	Rp 658.920.000,00	Rp 1.647.300.000,00	Rp 988.380.000,00
	Jumlah I + II			Rp 11.348.539.000,00	Rp 2.269.707.800,00	Rp 5.674.269.500,00	Rp 3.404.561.700,00

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

Lampiran II : Peraturan Bupati Katingan

Nomor : 4 Tahun 2011

Tanggal : 28 Maret 2011

Tentang : Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP Negeri Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011

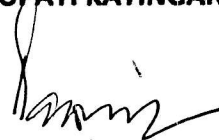
KODE REKENING					NAMA REKENING
5	2				<b>BELANJA LANGSUNG</b>
5	2	1			<b>BELANJA PEGAWAI</b>
5	2	1	02		Honorarium Non PNS
5	2	1	02	02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5	2	1	03		<b>Uang Lembur</b>
5	2	1	03	01	Uang Lembur PNS
5	2	1	03	02	Uang Lembur Non PNS
5	2	1	05		<b>Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS</b>
5	2	1	05	01	Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan
5	2	1	05	02	Belanja Sosialisasi
5	2	1	05	03	Belanja Bimbingan Teknis
5	2	2			<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>
5	2	2	01		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor
5	2	2	01	02	Belanja Perlengkapan Kantor
5	2	2	01	03	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
5	2	2	01	04	Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5	2	2	01	05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5	2	2	01	07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	2	01	08	Belanja Pengisian Gas
5	2	2	01	09	Belanja Pengisian Freon AC
5	2	2	01	10	Belanja Perlengkapan Olahraga
5	2	2	01	11	Belanja Perlengkapan Menjahit
5	2	2	01	12	Belanja Perlengkapan /Kebutuhan Dapur
5	2	2	01	13	Belanja Perlengkapan/Kebutuhan Dokumentasi
5	2	2	01	14	Belanja Piala/Plakat/Karangan Bunga
5	2	2	01	15	Belanja Pakan Ternak dan Ikan
5	2	2	01	16	Belanja Pupuk
5	2	2	01	17	Belanja Papan Pengumuman/Papan Nama/Baliho/Spanduk/Umbul-Umbul
5	2	2	01	18	Belanja Bahan Kerajinan/Keterampilan
5	2	2	02		<b>Belanja Bahan Material</b>
5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan
5	2	2	02	02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5	2	2	02	04	Belanja Bahan Obat- Obatan
5	2	2	02	06	Belanja Bahan baliho/Umbul-Umbul / Spanduk
5	2	2	03		<b>Belanja Jasa Kantor</b>

KODE REKENING					NAMA REKENING
5	2	2	03	01	Belanja Telepon
5	2	2	03	02	Belanja Air
5	2	2	03	03	Belanja Listrik
5	2	2	03	04	Belanja Jasa Advertising/Iklan Media Massa
5	2	2	03	05	Belanja Surat Kabar/ Majalah
5	2	2	03	06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet
5	2	2	03	07	Belanja Paket/ Pengiriman
5	2	2	03	13	Belanja Akomodasi dan Transportasi
5	2	2	03	17	Belanja Aplikasi/ Software Komputer
5	2	2	06		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>
5	2	2	06	01	Belanja Cetak
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan
5	2	2	07		<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir</b>
5	2	2	07	03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5	2	2	11		<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>
5	2	2	11	01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
5	2	2	11	02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5	2	2	11	03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu
5	2	2	11	04	Belanja Makanan dan Minuman Lembur
5	2	2	20		<b>Belanja Pemeliharaan</b>
5	2	2	20	01	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	2	20	02	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	2	20	03	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan
5	2	2	20	04	Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas
5	2	2	20	05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
5	2	2	20	06	Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga
5	2	2	20	07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kerja
5	2	2	20	08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
5	2	2	20	12	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik
5	2	2	20	13	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik
5	2	2	20	19	Belanja Pemeliharaan Perpustakaan
5	2	3			<b>BELANJA MODAL</b>
5	2	3	10		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>
5	2	3	10	01	Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
5	2	3	10	02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung
5	2	3	11		<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>
5	2	3	11	02	Belanja Modal Pengadaan Almari
5	2	3	11	05	Belanja Modal Pengadaan White Board
5	2	3	11	07	Belanja Modal Pengadaan Gorden
5	2	3	11	13	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
5	2	3	11	16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
5	2	3	11	18	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama dan Pengumuman
5	2	3	11	22	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera
5	2	3	11	24	Belanja Modal Pengadaan Karpet Lantai
5	2	3	11	25	Belanja Modal Pengadaan Stavolt

KODE REKENING					NAMA REKENING
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>12</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer</b>
5	2	3	12	03	Belanja Modal Pengadaan Komputer / Note Book
5	2	3	12	04	Belanja Modal Pengadaan Printer
5	2	3	12	09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash disk, mouse, keyboard, hardisk ,dll)
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>13</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Mebelair</b>
5	2	3	13	01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
5	2	3	13	02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat
5	2	3	13	04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja
5	2	3	13	05	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat
5	2	3	13	08	Belanja Modal Pengadaan Sofa
5	2	3	13	09	Belanja Modal Pengadaan Rak Buku/TV/ Kembang
5	2	3	13	11	Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>14</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>
5	2	3	14	02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas
5	2	3	14	04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser
5	2	3	14	07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau
5	2	3	14	10	Belanja Modal Pengadaan Panci/ceret
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan RumahTangga</b>
5	2	3	15	02	Belanja Modal Pengadaan Jam dinding/Meja
5	2	3	15	03	Belanja Modal Pengadaan Cermin
5	2	3	15	04	Belanja Modal Pengadaan Pigura
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>16</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Studio</b>
5	2	3	16	05	Belanja Modal Pengadaan Sound System
5	2	3	16	06	Belanja Modal Pengadaan Amplifier
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>17</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Komunikasi</b>
5	2	3	17	01	Belanja Modal Pengadaan Telepon
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>20</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Laboratorium</b>
5	2	3	20	09	Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Peraga /Praktik Sekolah
5	2	3	20	10	Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Laboratorium Kesehatan
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>27</b>		<b>Belanja Modal Pengadaan Buku/ Kepustakaan</b>
5	2	3	27	01	Belanja Modal Pengadaan Buku Matematika
5	2	3	27	02	Belanja Modal Pengadaan BukuFisika
5	2	3	27	03	Belanja Modal Pengadaan Buku Kimia
5	2	3	27	04	Belanja Modal Pengadaan Buku Biologi
5	2	3	27	05	Belanja Modal Pengadaan Buku Biografi
5	2	3	27	06	Belanja Modal Pengadaan Buku Geografi
5	2	3	27	07	Belanja Modal Pengadaan Buku Astronomi
5	2	3	27	08	Belanja Modal Pengadaan Buku Arkeologi
5	2	3	27	09	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra
5	2	3	27	10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan
5	2	3	27	11	Belanja Modal Pengadaan Buku Sejarah
5	2	3	27	12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya
5	2	3	27	13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

KODE REKENING					NAMA REKENING
5	2	3	27	14	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial
5	2	3	27	15	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Politik dan Ketatanegaraan
5	2	3	27	16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
5	2	3	27	17	Belanja Modal Pengadaan Buku Ensiklopedia
5	2	3	27	18	Belanja Modal Pengadaan Buku Kamus Bahasa
5	2	3	27	19	Belanja Modal Pengadaan Buku Ekonomi dan Keuangan
5	2	3	27	20	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan
5	2	3	27	21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan
5	2	3	27	22	Belanja Modal Pengadaan Buku Naskah
5	2	3	27	23	Belanja Modal Pengadaan Terbitan Berkala(Jurnal, Compact Disk)
5	2	3	27	24	Belanja Modal Pengadaan Microfilm
5	2	3	27	25	Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe
5	2	3	27	26	Belanja Modal Pengadaan KTSP SMU
5	2	3	27	27	Belanja Modal Pengadaan Buku Fiksi dan Non Fiksi
5	2	3	27	28	Belanja Modal Pengadaan Buku Karya Umum
5	2	3	27	29	Belanja Modal Pengadaan Buku Bibliografi
5	2	3	31		<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Olahraga</b>
5	2	3	31	01	Belanja Modal Pengadaan Net Olahraga
5	2	3	31	02	Belanja Modal Pengadaan Raket
5	2	3	31	04	Belanja Modal Pengadaan Stop Wood
5	2	3	31	06	Belanja Modal Pengadaan Papan Catur
5	2	3	31	14	Belanja Modal Pengadaan Skeeping
5	2	3	31	15	Belanja Modal Pengadaan Bendera Olahraga(start,wasit dll)
5	2	3	31	17	Belanja Modal Pengadaan Peluit Olahraga
5	2	3	31	19	Belanja Modal Pengadaan Bola

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

**FORMAT - BOS**

# Format BOS-01A, Lembar Kerja Individu Sekolah SD (LKIS SD)

## LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH (LKIS) TINGKAT SD TAHUN PELAJARAN .....

- Nama sekolah : ..... NPSN : .....
- Satuan pendidikan :  (1) SD  (2) SDLB, Status sekolah :  (1) Negeri  (2) Swasta
- Alamat sekolah:  
 Jalan/Desa/Kel : ..... Kecamatan : .....  
 Kabupaten/kota : ..... Provinsi : .....  
 No. Tlp sekolah : (.....) ..... No. Hp Kepsek : .....

4. Isilah keadaan murid di sekolah saucara pada tabel berikut per Juli 2010 setelah penerimaan murid baru!

Murid	Jumlah murid per kelas						Total	Jumlah murid usia 7-12
	1	2	3	4	5	6		
Laki-laki	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Perempuan	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	
Total	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	

5. Isilah data murid putus sekolah selama tahun pelajaran 2009/10 dan murid mengulang kelas pada tahun pelajaran 2010/11

Jumlah murid	Kelas						Total
	1	2	3	4	5	6	
Putus sekolah	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Mengulang kelas	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

- Status akreditasi sekolah?  (1) A  (2) B  (3) C  (4) Belum lulus akreditasi  (5) Belum diakreditasi
- Apa kategori sekolah ini?  (1) SDSN  (2) RSBI  (3) SBI  (4) Bukan SDSN/RSBI/SBI
- Apakah sekolah menerima dana BOS?  (1) Ya  (2) Tidak
- Apakah sekolah melaksanakan MBS?  (1) Ya  (2) Tidak
- Apakah sekolah melaksanakan KTSP?  (1) Ya  (2) Tidak  
 Jika "Ya", yang menyusun KTSP:  (1) Sekolah sendiri  (2) MGMP/KKG  (3) Pinjam dari sekolah lain
- Apakah sekolah memiliki ruang perpustakaan ukuran minimal seluas 56 m<sup>2</sup>?  (1) Ya  (2) Tidak
- Berapa jumlah buku pengayaan dan buku referensi yang dimiliki sekolah?  
 (a) Pengayaan fiksi ..... judul; (b) Pengayaan non-fiksi ..... judul; (c) Buku referensi ..... judul
- Apakah sekolah memiliki alat peraga pendidikan, berikut ini?  
 (a) Peraga IPA  (1) Ya  (2) Tidak (d) Peraga Bhs Indonesia  (1) Ya  (2) Tidak  
 (b) Peraga Matematika  (1) Ya  (2) Tidak (e) Alat olah raga  (1) Ya  (2) Tidak  
 (c) Peraga IPS  (1) Ya  (2) Tidak (f) Alat kesenian  (1) Ya  (2) Tidak
- Apakah sekolah memiliki ruang UKS minimal seluas 12 m<sup>2</sup>?  (1) Ya  (2) Tidak
- Apakah sekolah memiliki sarana komputer (Komputer Desktop-PC dan/atau Laptop)?  (1) Ya  (2) Tidak  
 Jika "Ya", berapa unit? Desktop-PC : ..... unit Laptop : ..... unit
- Apakah sekolah memiliki fasilitas internet?  (1) Ya  (2) Tidak  
 Jika "Ya", menggunakan penyedia jasa (provider) apa?  (1) Jardiknas  (2) Lainnya
- Jumlah ruang kelas dan rombongan belajar:  
 Total ruang kelas yang dimiliki ..... ruang; Total rombongan belajar yang ada ..... rombel

18. Isilah Informasi tentang kondisi ruang kelas di sekolah saudara pada tabel berikut!

Jumlah ruang kelas kondisi BAIK	Jumlah ruang kelas kondisi RUSAK RINGAN	Jumlah ruang kelas kondisi RUSAK BERAT
..... Ruang	..... Ruang	..... Ruang

....., 20.....  
 Kepala Sekolah  
 .....  
 (cantumkan nama, ttd dan cap sekolah)

### PANDUAN PENGISIAN LKIS TAHUN PELAJARAN 2010/11

- Nama sekolah diisi lengkap sesuai nama yang tertera pada papan nama sekolah, NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional
- Sudah jelas

Format BOS-01B, Lembar Kerja Individu Sekolah SMP (LKIS SMP)

**LEMBAR KERJA INDIVIDU SEKOLAH (LKIS) SMP/SEDERAJAT TAHUN PELAJARAN .....**

Isi informasi pada bagian yang disediakan, atau beri tanda silang pada pilihan!

- Nama sekolah : ..... NPSN/NSS : .....
- Satuan pendidikan :  1 SMP  2 SMPLB  3 SMPT; Status sekolah :  1 Negeri  2 Swasta
- Alamat sekolah, Jalan/Desa/Kel : .....  
Kecamatan : .....  
Kab/kota : ..... Prov. : .....  
Telp. sekolah : ..... HP Kepsek : .....

4. Jumlah siswa:

Kelas	7		8		9		Total		Usia 13-15 Tahun	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Jumlah										

- Status akreditasi sekolah  1 Terakreditasi A  2 Terakreditasi B  3 Terakreditasi C  4 Belum terakreditasi
- Kategori sekolah  1 Potensial  2 SSN  3 RSBI  4 SBI
- Menerima BOS  1 Ya  2 Tidak
- Melaksanakan MBS  1 Ya  2 Tidak
- Melaksanakan KTSP  1 Ya  2 Tidak  
Jika "Ya", yang menyusun:  1 Guru sendiri  2 MGMP/KKG  3 Pinjam dari sekolah lain
- Ruang perpustakaan sekolah  1 Ada, ..... m<sup>2</sup>  2 Tidak ada
- Jumlah buku teks pelajaran yang dimiliki sekolah  
(a) Jumlah mata pelajaran ..... mapel; (b) Jumlah judul ..... judul
- Jumlah buku pengayaan yang dimiliki sekolah  
(a) Pengayaan fiksi ..... judul; (b) Pengayaan non-fiksi ..... judul; (c) Buku referensi ..... judul
- Alat peraga pendidikan yang dimiliki sekolah  
(a) Peraga IPA  1 Ada  2 Tidak ada  
(b) Peraga Matematika  1 Ada  2 Tidak ada  
(c) Peraga IPS  1 Ada  2 Tidak ada  
(d) Alat olah raga  1 Ada  2 Tidak ada  
(e) Alat kesenian  1 Ada  2 Tidak ada
- Ruang UKS sekolah  1 Ada, ..... m<sup>2</sup>  2 Tidak ada
- Komputer milik sekolah  1 Ada  2 Tidak ada  
Jika "Ada", jumlahnya PC: ..... unit Laptop: ..... unit
- Fasilitas internet di sekolah  1 Jardiknas  2 Lainnya  3 Tidak ada
- Jumlah ruang kelas dan rombongan belajar:  
Total ruang kelas ..... ruang; Jumlah rombongan belajar ..... rombel
- Kondisi ruang kelas:

Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
..... ruang	..... ruang	..... ruang

....., 20.....  
Kepala Sekolah

.....  
(cantumkan nama, ttd dan cap sekolah)

**CONTOH**  
**RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d .....**  
Jumlah Siswa : ..... siswa  
Jumlah Dana BOS : Rp .....

**A. Dana BOS Boleh digunakan untuk (Sesuaikan dengan Panduan BOS)**

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendataan, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah gratis, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan).
2. Pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan (hanya bagi sekolah yang tidak menerima DAK).
3. Pembelian buku teks pelajaran lainnya (selain yang wajib dibeli) untuk dikoleksi di perpustakaan.
4. dst.....

**B. Dana BOS Tidak Boleh digunakan untuk (Sesuaikan dengan Panduan BOS)**

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
4. dst .....
- 5.

**C. Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah**

No	Komponen	Jumlah Dana (Rp)
<b>Total</b>		

Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara

(.....)

(.....)

(.....)

**CONTOH**  
**LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE ..... s/d .....**

**A. Pengeluaran**

No	Jenis Pengeluaran	Tanggal/Bulan	Jumlah (Rp)

**B. Pembelian Barang/Jasa**

No	Barang/Jasa yang dibeli	Tanggal/Bulan	Nama Toko/ Penyedia Jasa	Jumlah (Rp)

Ketua Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara

(.....)

(.....)

(.....)

**NAMA SD/SMP NEGERI**  
MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN BEBAS PUNGUTAN  
BAGI SELURUH SISWA



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI



DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

**NAMA SD/SMP NEGERI (RSBI/SBI)**  
MEMBEBAHKAN PUNGUTAN BAGI SISWA MISKIN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI



DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

**NAMA SD/SMP SWASTA**  
MEMBEBAHKAN PUNGUTAN BAGI SISWA MISKIN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI



DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA

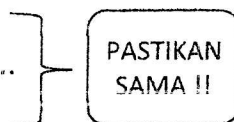
### NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Pada hari ini ....., tanggal ..... buian ..... tahun ....., yang bertanda-tangan dibawah ini:

- I. Nama : .....
- NIP : .....
- Pangkat : .....
- Jabatan : .....
- Instansi : .....
- Alamat : .....

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati/Walikota Kabupaten/Kota ..... yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : .....
- No.KTP : .....
- Jabatan : Kepala Sekolah
- Alamat : ..... Kec. ....Kab/Kota. ....
- Kegiatan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)



Yang bertindak untuk dan atas nama .....(sekolah) Desa/Kel..... Kec..... Kabupaten/Kota ..... selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang sebesar Rp .....,- (.....  
.....rupiah);
- (2) Dana sebagaimana ayat (1) dipergunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (3) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) bertujuan untuk membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun dan meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

dengan mengikuti ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari NPHD ini;

- (4) Penggunaan dana sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) khusus untuk jenis kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikelola dengan mekanisme manajemen berbasis sekolah.

## **Pasal 2**

### **PENCAIRAN DANA HIBAH DAERAH**

- (1) Pencairan dana hibah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota .....Tahun 2011 dilakukan secara triwulanan;
- (2) Untuk pencairan dana hibah daerah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri :
  - a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
  - b. Fotokopi Rekening Sekolah yang masih aktif ;
  - c. Surat Pernyataan Bertanggungjawab Mutlak/Pakta Integritas
- (3) PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK PERTAMA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Buku Panduan Bantuan Operasional (BOS) dan ketentuan perundangan yang berlaku;

## **Pasal 3**

### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- (2) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Membuat dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah daerah beserta bukti transaksi kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum berakhirnya triwulanan dimaksud setelah dana di transfer ke rekening sekolah;
- (4) Pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan dana sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

- (5) Apabila dalam batas yang telah ditentukan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Menyimpan laporan realisasi penggunaan dana hibah serta bukti-bukti lainnya yang sah sesuai dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- (7) Apabila dalam penggunaan dana hibah terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah daerah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah daerah berdasarkan proposal dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban segera mencairkan dana hibah daerah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan lengkap dan benar melalui verifikasi Pemerintah Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 5**

#### **ADDENDUM**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan hibah;
- (2) Perubahan RAPBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.

#### **Pasal 6**

#### **LAIN-LAIN**

- (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 5 (lima), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

- (2) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

**PIHAK KEDUA,**

**PIHAK PERTAMA,**

.....  
(Nama Kepsek, TT & stempel)

.....  
(jabatan)

NIP. ....

**Catatan untuk NPHD :**

*NPHD dibuat rangkap 5 (lima) dengan tanda tangan asli dan stempel basah. Lembar pertama PIHAK PERTAMA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK KEDUA). Lembar kedua PIHAK KEDUA bermaterai cukup (untuk disimpan PIHAK PERTAMA).*

**Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :

Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, tanggal 8 Nopember 2007 Nomor 900/2677/SJ perihal Hibah dan Bantuan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan tanggal 6 Nopember 2008 Nomor 169/PMK.07/2008 perihal Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah. Dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana hibah dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten/Kota .....Tahun 2011, akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:  
Manajer BOS Kab/Kota

.....  
(Nama Terang & Stempel)

Nama Kab/Kota, bukan desa/Kel

.....2010  
Nama Sekolah.....  
Kepala Sekolah,

Materai  
Rp.6000

.....  
(Nama Terang & Stempel)

**KWITANSI**

No : .....

TERIMA DARI : BUPATI/WALIKOTA.....

SEBESAR : ===== RUPIAH =====

UNTUK PEMBAYARAN : BELANJA HIBAH UNTUK BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KABUPATEN/KOTA ..... TAHUN 2011  
KEPADA SEKOLAH ..... DESA /  
KELURAHAN ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN/KOTA .....DALAM RANGKA  
KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Rp. ....,-

TERBILANG :

Nama Kab/Kota, bukan desa/Kel

..... 2010

Mengetahui:

MANAJER BOS KAB/KOTA .....

KEPALA SEKOLAH .....

DESA/KEL.....

Materai  
Rp.6000,-

.....

(Nama Terang & Stempel)

.....

(Nama Terang & Stempel)



**LEMBAR PENCATATAN PERTANYAAN/KRITIK/SARAN**

1. Identitas Penanya/Pemberi Saran

a. Nama : .....

b. Alamat : .....

.....

2. Tanggal Penerimaan Pertanyaan/Saran : .....

3. Uraian Pertanyaan/Saran:

.....

.....

.....

4. Penerima Pertanyaan/Saran : .....

5. Tindak Lanjut Saran:

.....

.....

.....

..... 200\_

Melaporkan:

UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.....

**LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT**

i. Identitas Pengadu

- a. Nama : .....
- b. Alamat : .....

2. Tanggal Terima Pengacuan : .....

3. Lokasi Kejadian

- a. RT/RW/Dusun : .....
- b. Desa/Kelurahan : .....
- c. Kabupaten/Kota : .....
- d. Provinsi : .....

4. Uraian Pengaduan:

.....

.....

5. Tanggal Penyelidikan Dilakukan : .....

6. Penyelidik : .....

7. Temuan:

.....

.....

8. Keputusan/Rekomendasi:

.....

.....

9. Pelaksanaan Keputusan

.....

.....

10. Tanggal pemberitahuan kepada Pengadu tentang keputusan/dan pelaksanaan keputusan : .....

11. Dokumen yang diterima:

.....  
.....  
.....  
.....

..... 200\_

Melaporkan:

UPM Prov/Kab/Kota/Sekolah,

.....

Format BOS-09 Daftar Buku Teks Yang Dibeli Oleh Sekolah

Daftar Buku Teks Yang Dibeli Sekolah Dari Dana BOS

Periode \_\_\_\_\_

Sekolah :  
 Alamat :  
 Alokasi Dana BOS :  
 Jumlah Siswa :

No	Judul Buku	Pengarang	Penerbit	Jumlah Buku
<b>Jumlah</b>				

....., tanggal .....

Kepala Sekolah

Komite Sekolah

.....  
 NIP

Format BOS-10 Rekapitulasi Buku Teks Yang Dibeli Oleh Sekolah

Rekapitulasi Jumlah dan Judul Buku Yang Dibeli Sekolah

Periode \_\_\_\_\_

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	NSS	Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Dana (Rp)	Jumlah Buku (eks)
<b>Total</b>					

Rekapitulasi Judul Buku

No	Judul Buku	Penerbit	Jumlah Buku (eks)

....., tanggal .....

Dewan Pendidikan  
Kab/Kota .....

Kepala Dinas Pendidikan  
Kab/Kota .....

.....

.....

NIP